# BAB 12 MUTU PENDIDIKAN

### Dr. Ambar Sri Lestari, M.Pd

**UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

#### PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan suatu kondisi yang tidak terpikirkan sebelumnya akan adanya *pandemic* wabah yang dikenal dengan nama Corona Virus (COVID19) yang telah mengguncangkan sendi- sendi kehidupan dari segala aspek meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan untuk beberapa waktu kurang lebih 3 bulan sejak Maret, April, Mei 2020 di seluruh belahan dunia yang mengharuskan beberapa Negara melakukan kebijakan *Lockdown* bagi negaranya masing- masing bahkan di Indonesia pemerintah mewajibkan masyarakat untuk bekerja, beribadah dan belajar dilakukan dari rumah. Hal ini tentunya membawa perubahan pada perilaku manusia dimanapun itu karena kita harus mengikuti perubahan kondisi untuk tetap *survive* dalam berbagai hal, anjuran untuk tidak berkerumun, menjaga jarak (*social distancing*), menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan menjadi kunci utama dalam keberlangsungan hidup manusia pada saat ini. Covid19 memang telah merubah pola hidup kita, makhluk yang tak kasat mata yang bisa menghinggapi kapan dan di mana saja dan pada siapa saja karena Covid ini tidak mengenal usia muda maupun lansia dan akhirnya menyadarkan manusia akan kelemahan dan ketidakberdayaannya agar menjadi lebih teratur dan tidak menyepelekan kebersihan dan kesehatan.

Dalam bidang pendidikan tergambar potret pembelajaran pun berubah yang semula bertatap muka dikelas secara konvensional hari ini dengan kondisi pandemi Covid19 yang masih berlangsung sampai sekarang setelah tiga bulan berlalu maka belajar pun berubah mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi melalui Daring (*online/virtual*) atau yang disebut *e-learning* (pembelajaran elektronik). Disatu sisi pembelajaran *online* ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia Pendidikan untuk mengikuti arus perkembangan era 4.0 dan memasuki era 5.0, bagi negara-negara maju tentu ini bukan hal yang baru atau sulit karena masyarakat dan pemerintah sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi yaitu internet, namun demikian tidak dengan Indonesia yang sangat luas cakupan secara geografis dan kemajemukan masyarakatnya, serta ketersediaan sarana pendukung dalam pemanfaatan teknologi khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) meliputi sumber daya manusia yaitu guru sebagai ujung tombak perubahan pembelajaran dimasa *pandemic* Covid19 saat ini. Sistem pembelajaran *online* bukan saja memberi warna baru dalam belajar namun bisa memberikan kesenjangan yang besar dan semakin melebar pada masyarakat kita. Beberapa masalah yang ditimbulkan dari dampak pembelajaran *online* ini diantaranya: bagi sebagian ekonomi orangtua yang terdampak covid19 sangat terpukul dengan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelajaran *online* (penyediaan kuota internet), sehingga bisa menaikkan angka putus sekolah. Tidak semua masyarakat bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah karena kompleksitasnya masalah yang ada pada tiap-tiap keluarga, keadaan keluarga yang beranggotakan anak dalam usia sekolah hanya 1 atau 2 tentu berbeda dengan anak yang harus sekolah 3 orang atau lebih. Ini tentu semakin memberatkan orangtua dengan ekonomi rendah, apalagi keluarga-keluarga yang tidak mendapat Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan karena kurangnya mereka untuk mengurus hak sebagai warga negara maupun sebab lainnya yang sangat beragam. Beberapa bantuan di masyarakat juga kurang tepat pada yang berhak menerima karena data-data yang tidak terorganisir dengan baik dan tidak di *update*, sehingga yang miskin semakin sulit dan tertekan karena terhimpit kebutuhan ekonomi, hal ini tentu saja sangat berpengaruh besar

202 | MANAJEMEN PENDIDIKAN

pada mental dan psikologi anak dalam belajar, melihat orangtua dalam keadaan sulit dapat memicu emosi dan sebagainya sehingga bisa saja anak sebagai pelampiasan kemarahan orang tua.

Hal ini berakibat fatal bagi pembentukan dan perkembangan diri anak sendiri maupun masa depannya, karena keluarga yang cemas, penuh emosi, akan berimbas pada kualitas pendidikan seorang anak dan akhirnya pada kualitas pendidikan itu secara menyeluruh. Dalam kondisi *pandemic* Covid19 ini tentu sangat signifikan mempengaruhi pada segala aspek masih menjadi kendala yang menjadi persoalan mendasar dalam pendidikan selama ini terutama mengenai akses pendidikan dan kualitas pendidikan. Beberapa indikator dalam hal akses pendidikan meliputi: angka partisipasi murni, angka putus sekolah, hingga lama bersekolah, sedangkan masalah kualitas terkait pada SDM, kurikulum hingga daya saing. Saat ini belajar mau tidak mau, suka tidak suka terkait dengan teknologi informasi yang menjadi sarana belajar dengan membutuhkan lebih banyak tingkat pengeluaran orangtua secara ekonomi dengan menyediakan kuota internet untuk anak-anak belajar. Dimasa *pandemic* covid19 ini pendidikan mendapat tantangan yang besar dalam mengelola atau mengatur bagaimana proses pembelajaran berlangsung terutama secara *online*/daring/virtual khususnya terlebih untuk daerah 3T (tertinggal, terdapat, terjauh) yang masih banyak kendala dan membutuhkan perhatian yang serius dan lebih mendalam oleh pemerintah.

Tulisan ini membahas terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu pada Satuan Pendidikan dan kita ketahui bahwa luasnya wilayah geografis Indonesia dengan beragam dan bervariasinya kondisi pada masing-masing daerah dimana setiap satuan pendidikan tidak bisa disamaratakan terkait mutu pada lembaga tersebut. Berbicara tentang mutu mengacu pada kepuasan seorang individu terhadap barang/jasa, dimana mutu merupakan suatu hal yang menjadi tolok ukur dari standar pendidikan nasional secara keseluruhan yang di pengaruhi banyak *factor* diantaranya SDM, Sarana Prasarana, Kurikulum, Materi Ajar dan Pembiayaan. Sistem Penjaminan Mutu pada pembahasan ini merupakan penjaminan mutu pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang tertuang dalam Standar Pendidikan Nasional (SNP) oleh pemerintah melalui Badan Standar

MANAJEMEN PENDIDIKAN | 203

Nasional Pendidikan (BSNP), dimana standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan dalam mengelola pendidikan, diantaranya meliputi: 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Penilaian, 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Sarana dan Prasarana, dan 8) Standar Pembiayaan. Penjaminan mutu merupakan kegiatan dalam *monitoring*, evaluasi terhadap kajian mutu sesuai persyaratan dan standar minimum pada komponen *input*, proses, dan hasil atau *outcome* yang mengarahkan pada kepuasan pelanggan.

#### PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Di dalam Permendikbud No.28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan Penjaminan mutu merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja sebuah organisasi dengan program peningkatan mutu. Dalam Permendiknas No.63 Tahun 2009, mendefinisikan Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan yang merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan satuan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan untuk kepuasan *stakeholders*. Sebagai sebuah proses penjaminan mutu memiliki 3 kegiatan, diantaranya:

* 1. Pangkalan Data (data *base*) merupakan keharusan yang wajib dimiliki oleh satuan pendidikan mulai dari *input*, proses, *output* sampai *outcome*, sehingga satuan pendidikan ini memiliki data-data real *time* yang dapat diperbaharui terus mengikuti perkembangan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menyimpan data, mengolah sampai menganalisis data-data untuk suatu pengambilan keputusan. Pada satuan pendidikan yang berada di wilayah perkotaan secara umum telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis penyimpanan, pengolahan hingga pengevaluasian namun demikian tidak dengan daerah 3T yang harus segera mendapat pembenahan infrastruktur oleh pemerintah baik pusat dan daerah sehingga tidak akan tertinggal dengan daerah diperkotaan, hal ini sangat *urgent* menjadi perhatian pemangku kebijakan sehingga peserta didik bisa mendapatkan hak belajar yang adil dan para pendidik serta tenaga

204 | MANAJEMEN PENDIDIKAN

kependidikan juga dapat menjalankan dan mengelola proses pembelajaran dengan baik yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan mutu pada satuan pendidikan di masing-masing daerah.

* 1. Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan komponen dalam sistem penjaminan mutu untuk membantu keberlangsungan penjaminan mutu pada satuan pendidikan dalam rangka memberi kepuasan pada *stakeholder* internal, yaitu peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sebagai bentuk akuntabilitas internal. Harapan para *stakeholder* menjadi hal yang harus dievaluasi secara berkesinambungan karena dengan perbaikan secara terus-menerus maka satuan pendidikan dapat mencapai visi misi sekolah dan bisa mensejajarkan dengan satuan pendidikan baik diwilayahnya maupun diluar wilayah. Ini merupakan suatu proses yang membutuhkan *sinergitas* dari berbagai pihak sehingga akan mendapatkan kepercayaan dan nilai lebih dimasyarakat untuk menitipkan anak-anak dalam menuntut ilmu.
	2. Penjaminan Mutu Eksternal (PME) merupakan komponen pendukung eksternal yang diakui pemerintah, dimana standar yang harus dicapai satuan pendidikan diharapkan bisa melebihi Standar Nasional Pendidikan dalam rangka memberi kepuasan pada *stakeholder* eksternal, yaitu orangtua, masyarakat, pemerintah, lembaga lain, sebagai bentuk akuntabilitas eksternal. Harapan masyarakat seluruh *stakeholder* adalah para peserta didik dalam terjun dimasyarakat dengan bekal ilmu baik secara teoretis dan praktis agar dapat terserap didunia kerja dan dapat bersaing dalam bidang masing-masing. Ini merupakan tantangan besar yang memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk ikut dalam membenahi sarana prasarana belajar terutama bagi satuan pendidikan yang terkait dengan bidang praktis, dan keluaran atau *output* dapat dibuktikan dengan kompetensi lulusan yang memadai untuk bersaing dipasar kerja.

Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan beberapa hal menjadi prinsip dasar yang harus dipahami oleh semua unsur sehingga proses penjaminan mutu akan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu diantaranya adalah: 1) prinsip berkelanjutan, artinya penjaminan mutu

MANAJEMEN PENDIDIKAN | 205

harus dilakukan secara terus-menerus sesuai siklusnya sehingga mutu dapat tercapai secara maksimal; 2) prinsip terencana dan sistematis, artinya terkait dengan waktu harus memiliki target yang jelas dan terukur; dan 3) prinsip keterbukaan, artinya fleksibel dan mengikuti perkembangan jaman. Dalam menjaga mutu perlu banyak keterlibatan dari semua unsur karena bila kita sudah mendapat akreditasi yang tinggi tantangannya adalah bagaimana agar tetap berada pada posisi yang sama tidak turun karena akan mempengaruhi harapan pelanggan baik internal terutama eksternal terhadap satuan pendidikan tertentu. Hal inilah mengapa sangat penting mengacu pada prinsip-prinsip penjaminan mutu agar selalu berkesinambungan antara berbagai aspek baik sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum hingga pada keluaran serta aspek pembiayaan. Banyak dijumpai kasus-kasus di lapangan terutama pada tahap sosialisasi terhadap sistem penjaminan mutu masih terdapat para pendidik maupun tenaga kependidikan yang belum begitu memahami konsep penjaminan mutu sehingga di lapangan pada proses pelaksanaannya banyak terjadi tumpang tindih dan kesalahpahaman yang dapat berakibat tidak maksimalnya hasil yang dicapai dan diharapkan sesuai tujuan setiap satuan pendidikan.

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA SATUAN PENDIDIKAN

Mutu tidak terlepas dari unsur-unsur yang menjadi komponen utama yaitu terkait pada *input*, proses, dan *output* serta *outcome* yang dapat memenuhi tuntutan pengguna jasa pendidikan. Didalam sistem penjaminan mutu terdapat dua komponen (Juklak Penjaminan Mutu Pendidikan, 2017:4) yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah penjaminan mutu yang berjalan didalam satuan pendidikan yang dijalankan oleh seluruh komponen pendidikan, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan akreditasi dan badan standar.

206 | MANAJEMEN PENDIDIKAN



Gambar1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Sistem Penjaminan Mutu dalam Standar Nasional Pendidikan memiliki prinsip-prinsip yaitu:

1. Mandiri dan partisipatif, diharapkan satuan pendidikan dapat secara mandiri dan bersama-sama seluruh pemangku kepentingan disekolah untuk menyelenggarakan penjaminan mutu internal berbasis pengumpulkan data-data disekolah masing-masing
2. Terstandar yaitu penjaminan mutu internal dapat dilakukan sesuai persyaratan dan yang telah ditentukan standar pendidikan
3. Integritas yaitu menjunjung konsistensi dalam tindakan-tindakan penjaminan mutu berdasarkan nilai, metode, prinsip yang berlaku
4. *Sitematis* dan Berkelanjutan yaitu melaksanakan penjaminan mutu secara terorganisir dan melakukan perbaikan secara terus-menerus
5. *Holistic* yaitu proses penjaminan mutu dilakukan secara menyeluruh
6. Transparan dan Akun tabel yaitu proses penjaminan mutu berdasarkan transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)

Penjaminan Mutu Pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan melalui siklus yang ditunjukan pada gambar 2 berikut:

MANAJEMEN PENDIDIKAN | 207



Gambar 2 Siklus Penjaminan Mutu pada Satuan Pendidikan

Beberapa langkah dalam siklus terdiri dari:

1. Penetapan standar merupakan syarat dari pemenuhan mutu yang harus dicapai yang meliputi delapan standar dalam pendidikan nasional, meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan
2. Pemetaan mutu merupakan proses dari memilah dan menganalisis dari mutu masing-masing standar sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan apakah telah sesuai atau masih ada kekurangan yang harus dilakukan perbaikan secara terus menerus
3. Penyusunan rencana pemenuhan merupakan pengaturan bagaimana standar dapat tercapai sesuai harapan yaitu kepuasan pelanggan internal maupun eksternal dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pengevaluasian program-program yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu merupakan hasil dari ketercapaian masing-masing standar untuk dipenuhi oleh semua pihak yang berkepentingan dalam proses penjaminan mutu
5. Evaluasi/Audit Mutu merupakan proses *monitoring* yang dilakukan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sehingga mutu dapat melampaui harapan pelanggan.

Keseluruhan langkah dalam siklus penjaminan mutu ini harus dilaksanakan oleh seluruh komponen dengan melibatkan pemangku

208 | MANAJEMEN PENDIDIKAN

kepentingan sehingga akan menghasilkan implementasi sistem penjaminan mutu.

Gambar 3 Rapor Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Pada gambar 3 di atas setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tahap kondisi awal seluruh komponen dalam penjaminan mutu internal harus mendapatkan pemahaman yang baik dan seragam baik melalui pelatihan sebagai langkah pendampingan sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman maupun kekacauan dalam proses dilapangan. Ini penting karena tidak sedikit pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum memahami betul konsep sistem penjaminan mutu sehingga mengakibatkan tujuan tidak tercapai sesuai harapan *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Pada tahapan pertama dan seterusnya pelaksanaan sistem penjaminan mutu dilakukan melalui siklus secara berurutan sehingga akan mudah terdeteksi dimana terdapat kekurangan dalam implementasinya dan dapat segera dievaluasi. Pada tahap ini *monitoring* terus dilakukan sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan dan *sinergitas* semua unsur diperlukan dalam pencapaian target dan keterlaksanaan semua program yang telah ditentukan.

*Focus* dari pelaksanaan penjaminan mutu adalah perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) mulai dari awal pelaksanaan hingga terus berlanjut. Adapun Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan ditunjukan pada gambar 4 berikut:

MANAJEMEN PENDIDIKAN | 209



Gambar 4 Struktur Tim Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan

Pada gambar 4 di atas unsur penjaminan mutu bisa diambil dari sekolah yang dibentuk dalam Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang merupakan tim independen di luar manajemen sekolah terdiri dari perwakilan pimpinan satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan serta komite satuan pendidikan. Adapun pembagian tugas sistem penjaminan mutu satuan pendidikan untuk dapat melakukan koordinasi dengan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dapat dilihat pada Tabel 1berikut:

Tabel 1 Pembagian Tugas Sistem Penjaminan Mutu Pada Satuan

Pendidikan



Pada table 1 di atas menggambarkan masing-masing tugas baik pada satuan pendidikan maupun tim penjaminan mutu sekolah, dimana kedua unsur di atas sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar dalam

210 | MANAJEMEN PENDIDIKAN

proses penjaminan mutu dilapangan dan hasilnya akan dapat dilihat pada nilai yang dicapai dari masing-masing standar yang telah ditetapkan.

Untuk ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari *indicator* keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak, yang dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

Gambar 5 Indikator Keberhasilan Penjaminan Mutu Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu ini ditentukan oleh

beberapa hal, diantaranya:

1. Komitmen manajemen dan kepemimpinan (*management commitment and leadership*). Komitmen didefinisikan sebagai keinginan yang kuat untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan yang bernilai jangka panjang (Sheth & Mittal,2004). Salah satu pendukung utama adalah unsur manajemen yang dapat memberikan sumber daya (personel, waktu, teknologi, materi) yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang baik maka tujuan organisasi sulit tercapai. Dalam proses penjaminan mutu internal kedua hal tersebut sangat penting dalam menentukan keberlangsungan organisasi terutama dalam menjaga mutunya untuk kepuasan pelanggan internal yaitu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan sehingga akan tercipta harmonisasi dalam organisasi yang sehat yang berdampak pada kesuksesan organisasi tersebut.
2. Perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*). *Continous improvement* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk

MANAJEMEN PENDIDIKAN | 211

meminimalisir kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan jaman. Dalam penjaminan mutu hal ini dapat dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi awal, serangkaian pengukuran, identifikasi perbaikan dan pelaksanaan pada satuan pendidikan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT sehingga akan nampak kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada suatu organisasi

1. Mutu hasil belajar meningkat. Mutu hasil belajar dapat ditingkatkan melalui beberapa aspek, diantaranya: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi *supervise* akademik (Agi,2018: 254). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar.
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh (*total customes satisfaction*). Layanan menyeluruh merupakan tujuan dalam memenuhi kepuasan pelanggan, beberapa hal yang menjadi ukuran kepuasan diantaranya adalah: keandalan, berwujud, daya tanggap, kepastian, empati.
3. Keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan (*employee involvement*). Kemampuan tenaga pendidik dapat dilihat dari beberapa *indicator*, meliputi: rencana pembelajaran, prosedur pembelajaran, hubungan personal.
4. Pelatihan (*training*). Pendidik perlu mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan yang dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan yang masih dirasa kurang
5. Komunikasi (*communication*) menjadi penting dalam hubungan personal antara peserta didik maupun antar pendidik maupun tenaga kependidikan, hal ini menjadi *urgent* untuk diperhatikan sebagai masukan bagi pendidik agar mampu mengelola komunikasi yang baik.
6. Kerjasama (*teamwork*) merupakan hal yang penting bagi efektivitas suatu organisasi dalam proses pencapaian tujuan, terutama dalam penjaminan mutu sangat dibutuhkan kerjasama dari semua komponen dalam pemenuhan harapan pelanggan.

212 | MANAJEMEN PENDIDIKAN

#### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Delapan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan meliputi:

###### Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan tertuang pada Permendikbud No.20 Tahun 2016, yang mana cakupan kualifikasinya meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan peserta didik yang harus dicapai dari satuan pendidikan dasar dan menengah. Dari ketiga komponen yang harus dicapai peserta didik yaitu sikap merupakan cerminan sikap bagi seorang yang beriman, berakhlak, berilmu, bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alam untuk menempatkan diri sebagai warna Negara. Selanjutnya, pengetahuan merupakan kemampuan baik secara konseptual maupun operasional yang dimiliki peserta didik baik teknologi, seni dan budaya. Serta keterampilan merupakan kemampuan berpikir dan bertindak dalam menciptakan kreativitas dan inovasi baik secara abstrak maupun konkret dalam pengembangan diri peserta didik.

###### Standar Isi

Standar Isi tertuang pada Permendikbud No.21 Tahun 2016 yang merupakan kriteria minimal yang harus dicapai oleh peserta didik mencakup materi dan kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang meliputi struktur kurikulum, bab belajar, pengaturan waktu belajar/kalender pendidikan, kompetensi lulusan.

###### Standar Proses

Standar Proses tertuang pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 yang merupakan kriteria dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan.

###### Standar Penilaian

Standar Penilaian tertuang pada Permendikbud No.23 Tahun 2016 yang merupakan kriteria tentang lingkup, prinsip, tujuan, manfaat, mekanisme, prosedur dan *instrument* penilaian hasil belajar peserta didik.

MANAJEMEN PENDIDIKAN | 213

###### Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 yang mencakup kriteria minimal meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis maupun sosial. Dalam UU No.20 tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 dijelaskan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran sampai penilaian serta melakukan bimbingan, pelatihan dan pengabdian masyarakat.

###### Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana meliputi peralatan, media, buku dan sumber belajar untuk menunjang proses pembelajaran, sedangkan prasarana meliputi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang pimpinan dan sebaginya sebagai penunjang proses pendidikan.

###### Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan tertuang pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2007, yang meliputi tiga komponen yaitu standar pengelolaan satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemda, standar pengelolaan oleh pemerintah. Standar pengelolaan ini mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana/program serta pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen.

###### Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan tertuang pada Permen No.69 tahun 2009 yang mencakup biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana, mengembangkan sumberdaya manusia, dan modal kerja. Biaya operasi seperti gaji, bahan habis pakai, biaya operasi pendidikan lainnya. Dan biaya personal seperti biaya yang dikeluarkan peserta didik untuk proses pendidikan.

Untuk mencapai mutu pada kondisi seperti sekarang dengan adanya Covid19 ini tentu harus ada perbedaan dalam penyusunan kerangka Kurikulum yang meliputi: 1) Ide mencakup filsafat, sosial, individu dan teknologi, 2) Isi mencakup rencana pembelajaran, metode pembelajaran,

1. Implementasi mencakup aktivitas atau kegiatan dalam proses

214 | MANAJEMEN PENDIDIKAN

pembelajaran dan 4) Ketercapaian terhadap tujuan pada satuan pendidikan. Keempat faktor ini dapat menjadi tolok ukur dari mutu yang akan dicapai sesuai kondisi yang memaksa kita untuk mengikuti perubahan terlebih Menteri Pendidikan juga mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini harus menjadi perhatian bagi satuan pendidikan karena menjadi kesempatan sekaligus tantangan ke depan bahwa kondisi apapun tidak bisa kita prediksi secara statis namun kondisi itu berubah secara dinamis, maka pendidikan harus menyesuaikan dan mengikuti perubahan jaman dimana sekarang kita masuk pada era 4.0 yang mulai mengarah pada era 5.0 dimana pada era ini titik penting kehidupan manusia ada pada Big Data. Maka semestinya kurikulum juga mengikuti perubahan dan perkembangan jaman sehingga apa yang menjadi esensi dari kurikulum itu sendiri yaitu suatu perubahan perilaku peserta didik dalam hal pengetahuan dan cakap serta terampil dalam kehidupan. Hari ini pembelajaran sudah menuju pada digitalisasi maka tentu banyak perubahan yang harus dipelajari oleh para pendidik utamanya dalam mengajarkan pengetahuan pada peserta didik melalui teknologi informasi yang dapat memberikan sumber-sumber belajar secara luas untuk kemudian disaharing, diolah, dianalisis, hingga menjadi pengetahuan baru dan menciptakan kecakapan keterampilan pada peserta didik.

#### STUDI KASUS

Beberapa kasus dapat dijadikan gambaran tentang proses penjaminan mutu pada satuan pendidikan yang telah dilakukan, hal ini dapat menjadi rujukan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pada lembaga masing-masing.

Penelitian Nyoman Sridana, dkk (2018:46) menjelaskan beberapa hal, diantaranya terkait pemahaman kepala sekolah tentang sistem penjaminan mutu internal menunjukan skor 2,20 pada tingkat kurang, pada tenaga pendidik sebesar 2,13 sedangkan pada tenaga kependidikan dengan skor pemahaman 2,85 masih pada tingkatan kurang meskipun lebih tinggi dari pemahaman kepala sekolah. Yang masih menjadi kekurangpahaman terhadap SPMI antara lain mengenai konsep dan prinsip, tujuan dan cakupan SPMI satuan pendidikan.

MANAJEMEN PENDIDIKAN | 215

Penelitian Fitriyani, dkk (2019:86) pada sekolah model dan sekolah imbas, pada 8 standar pendidikan ditemukan bahwa: pada sekolah model dilihat dari standar kelulusan mencapai nilai 5,06; standar isi mencapai nilai 5,53; standar proses mencapai nilai 5,73; standar penilaian mencapai nilai 5,38; standar pendidik dan tenaga kependidikan mencapai nilai 2,52; standar sarana dan prasarana mencapai nilai 3,63; dan standar pembiayaan mencapai nilai 4,2. Sedangkan untuk sekolah Imbas dilihat dari standar kelulusan mencapai nilai 5,81; standar isi mencapai nilai 5,3; standar proses mencapai nilai 6,33; standar penilaian mencapai nilai 5,79; standar pendidik dan tenaga kependidikan mencapai nilai 0; standar sarana dan prasarana mencapai nilai 3,55; dan standar pembiayaan mencapai nilai 6,12. Dari hasil temuan dilapangan ini menunjukan ada beberapa perbedaan capaian antara sekolah model dan sekolah imbas dalam pemenuhan delapan standar nasional pendidikan dengan berbagai keragamannya masing-masing.

Penelitian Darmaji, dkk (2020:1) menggambarkan pencapaian mutu internal dilakukan melalui upaya: 1) *focus* pada peserta didik, 2) *focus* pada pencapaian atau hasil, 3) *focus* pada *branding*, 4) *focus* pada komitmen jangka panjang, 5) *focus* kerja *team*, 6) *focus* pada inovasi, 7) *focus* pada penciptaan kreativitas dalam belajar, dan 8) *focus* pada cita- cita bersama.

Strategi penjaminan mutu internal Sekolah dapat dilakukan melalui (Darmaji, 2020:178-181)

1. pengembangan silabus, meliputi: menentukan standar kompetensi (SK), menentukan kompetensi dasar (KD), mengadakan evaluasi mengacu pada Teori Bloom, menentukan *indicator* kompetensi masing-masing KD, menentukan materi pokok, menentukan metode pembelajaran, menentukan bentuk penilaian setiap *indicator*, menentukan alokasi waktu setiap pembelajaran dan menentukan sumber belajar
2. penentuan kriteria ketuntasan minimal (KKM), meliputi: tingkat kesulitan materi (kompleksitas), daya pendukung (sarana prasarana), dan tingkat kemampuan siswa (*intake*)
3. penentuan standar kelulusan (SKL) untuk mencapai nilai ketuntasan sekolah

216 | MANAJEMEN PENDIDIKAN

1. *supervise* pembelajaran dilakukan secara berkala baik akademik maupun administrasi
2. evaluasi pembelajaran, meliputi: penilaian setelah selesai satu pokok bahasan (PH), penilaian pada tengah semester (PTS), penilaian pada akhir semester (PAS) dan penilaian akhir tahun (PAT).

Seperti yang diungkapkan oleh Yunus (2007:3), ada empat cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu diantaranya *school review, benchmarking, quality assurance*, dan *quality control. School review* adalah kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak baik orangtua, masyarakat, tenaga ahli yang berfungsi untuk melakukan perbaikan secara terus menerus. *Benchmarking* adalah penetapan *standard* dan target yang akan dicapai dari mutu pendidikan melalui analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Penjaminan mutu merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis dalam proses pemenuhan standar mutu. Sedangkan *control* mutu merupakan sistem untuk mengecek penyimpangan kualitas yang tidak sesuai standar. Selain itu penilaian terhadap pendidik juga penting dalam memberikan umpan balik terutama dalam proses belajar mengajar sebagai bentuk evaluasi bagi pendidik maupun bagi sekolah sendiri serta adanya petugas yang membantu dalam proses penjaminan mutu internal dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.

Amir (2015) memberikan *focus* pada *economical, technical*, dan *organizational dimensions* as main *dimensions of feasibility system*. Hal ini menjelaskan bahwa *factor* ekonomi, teknis dan organisasi menjadi dimensi dalam kelayakan suatu *system*, terutama dalam penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Facktor-faktor ini merupakan dukungan bagi pelaksanaan penjaminan mutu dalam keberlangsungan suatu institusi untuk mencapai kepuasan pelanggan sehingga dapat memperoleh dan mempertahankan mutu dan prestasi yang baik dalam daya saing pada satuan pendidikan.

#### RANGKUMAN MATERI

Penjaminan mutu terbagi menjadi penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal dimana dalam proses penjaminan mutu harus

MANAJEMEN PENDIDIKAN | 217

dilakukan dengan prinsip kemandirian, partisipatif, integritas yang tinggi, terstandar, sistematis, menyeluruh serta keterbukaan dan akuntabilitas. Keberhasilan penjaminan mutu juga ditentukan oleh beberapa hal diantaranya; kepemimpinan yang baik, adanya komitmen dari manajemen, melakukan perbaikan secara terus-menerus, mengedepankan komunikasi, kerjasama, keterlibatan semua pihak dan pelayanan yang berkualitas untuk mencapai kepuasan pelanggan.

#### TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana proses pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan
2. Siapa saja yang masuk dalam tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan
3. Apa tugas tim penjaminan mutu sekolah
4. Apa *indicator* dari keberhasilan penjaminan mutu

218 | MANAJEMEN PENDIDIKAN

**DAFTAR PUSTAKA**

Amir, F. 2015. Developing Structure for Management of Quality in Schools: Steps towards Quality Assurance Systems. American Journal of Educational Research, Vol. 3, 8, p. 977-981 DOI:10.12691/education-3-8-5 <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Darmaji, Achmad Supriyanto, Agus Timan, Maulana Amirul Adha. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah di Satuan Pendidikan Dasar. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara. Vol.5 No.2, p. 172-186 ISSN: 2579-6461 (Online)

DOI:https://doi.org/10.29407/jpdn.v5i2.13190

Maehasa Putri, Agi, Uung Runalan. (2018). Peningkatan Mutu Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Supervisi Akademik Kepala Sekolah. Indonesian Journal of Education Management and Administration Review. Vol 2 Number 2, p.252-257 P ISSN: 2620-9616 E ISSN: 2620-

9624

Rosdiana, Fitriyani., Uung Runalan Soedarmo. (2019). Sistem Penjaminan Mutu dalam Mewujudkan Mutu Sekolah pada Sekolah Model dan Sekolah Imbas. Indonesian Journal of Education Management and Administration Review. Vol 3 No.1, p.83-88. P ISSN: 2620-9616 E ISSN: 2620-9624 doi : <http://dx.doi.org/10.4321/ijemar.v3i1.2951>

Sridana, Nyoman., Sudirman Wilian., Dadi Setiadi. (2018). Sistem Penjaminan Mutu di Satuan Pendidikan Menengah (SMA). Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA. Vo 1 No.1, p. 45-51 e-ISSN: 2655-5263 <https://www.researchgate.net/publication/330150619> DOI: [10.29303/jpmpi.v1i1.212](https://doi.org/10.29303/jpmpi.v1i1.212)

Sheth, Jagdiss N dan Banwari Mittal. (2004). Customer Behavior: Managerial Perspective, Second Edition, Singapore:Thomson

Yunus, Falah. (2007). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. <http://www.geocities.com/guruvalah/Manaj_Pening_Mutu_Pend.ht> ml.p.3

MANAJEMEN PENDIDIKAN | 219